

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu pula dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya dengan cara mengadakan pembangunan disegala bidang. Sesuai dengan tujuan pembangunan dan keinginan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual. Arah kebijakan ekonomi adalah mengembangkan perekonomian yang berorientasi pada kemajuan teknologi dan membangun kebasis kompetitif berdasarkan kebasis komperatif sebagai negara agraris. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berbasis dan sesuai dengan kompetisi produk basis setiap daerah terutama setelah adanya otonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Arsyad, 2013). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, sektor basis dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antardaerah dan antarsektor.

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 2013).

Sektor basis merupakan sektor perekonomian yang menjadi sektor dominan atau sektor yang menonjol dari suatu daerah. Dengan diketahui sektor basis suatu daerah maka pemerintah dan masyarakat daerah tersebut dapat terus mengembangkannya, sehingga sektor basis tersebut dapat menjadi sektor yang menguntungkan. Dan dengan adanya sektor basis maka dapat diketahui pula sektor-sektor yang tidak dominan dari daerah tersebut, sehingga pemerintah dapat mengupayakan atau mendorong sektor-sektor tersebut agar dapat menjadi sektor yang lebih kuat.

Sektor basis dapat diketahui salah satunya dengan menggunakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2010). Beberapa kegunaan serta analisis yang dapat diperoleh dari data PDRB antara lain besaran PDRB dapat digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Secara struktur ekonomi, PDRB dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang dominan di suatu daerah. PDRB juga dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu, dan dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia telah mengalami perubahan setelah dilakukannya sensus ekonomi pada tahun 2010 dengan 17 sektor yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Pengalihan, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik, Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estat, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa lainnya.

Provinsi Jambi terdapat sembilan kabupaten dan kota dimana tentunya setiap kabupaten dan kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai keadaan daerahnya masing-masing sehingga akan mempunyai PDRB

dengan tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang berbeda-beda.

Pertumbuhan ekonomi yang ada belum diketahui sektor ekonomi yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif. Sehingga pertumbuhan yang ada hanya terbatas pada angka-angka kuantitatif saja. Untuk itu setelah sektor basis diketahui, dilanjutkan dengan identifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komperatif. Tidak hanya itu, masalah lain yang harus di selesaikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas angka-angka dan memiliki arti penting adalah dengan mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi. Ini menjadi pengting, dikarenakan potensi yang belum diketahui keunggulannya sulit dikembangkan. Namun jika sudah diketahui sektor mana saja yang memiliki potensi masing-masing, maka pemerintah bisa mengambil sikap dan kebijakan terhadap sektor-sektor tersebut dengan lebih tepat. Masalah yang melanda Provinsi Jambi berhubungan dengan otensi ekonomi yaitu belum diketahui daerah masing-masing kabupaten/kota yang digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah, semua Kabupaten/Kota berjalan sendiri-sendiri membangun daerahnya. Tapi Provinsi memiliki peran sebagai koordinasi antar Kabupaten/Kota sehingga Provinsi harus mengetahui daerah mana yang bisa dijadikan contoh untuk memacu pengembangan pembangunan. Masalah terakhir yang penting yaitu belum adanya prioritas sektor basis dalam pengembangan pembangunan, dalam sektor terbaru tujuh belas sektor yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota memiliki program dalam kegiatan ekonominya. Namun tidak

semua dapat dijalankan serentak. Hal ini terkendala oleh anggaran yang dialokasikan. Untuk itu prioritas penentuan sektor basis harus dilaksanakan dengan harapan pemerintah dengan kebijakannya dan keterbatasan anggarannya memprioritaskan sektor-sektor basis.

Pada tahun 2018 PDRB harga konstan 2010 tanpa migas Provinsi Jambi sebesar 96.227.078,51 juta rupiah, dengan PDRB tertinggi yaitu Kota Jambi sebesar 15.307.400,8 juta rupiah dengan sektor paling dominan yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, disusul oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 11.695.760,7 juta rupiah dengan sektor paling dominan yaitu pertambangan dan penggalian, dan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 11.011.574,2 juta rupiah sektor paling dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, Kabupaten Bungo sebesar 10.331.457,2 juta rupiah dengan sektor paling dominan yaitu pertambangan dan penggalian. Batanghari sebesar 9.000.465,0 juta rupiah dengan sektor dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, Kabupaten Tebo sebesar 7.764.501,1 juta rupiah dengan sektor dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, Kabupaten Sarolangun sebesar 7.501.560,1 juta rupiah sektor dominan yaitu pertambangan dan penggalian. Selanjutnya Kabupaten Merangin sebesar 7.008.801,2 juta rupiah dengan sektor paling dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Di urutan ke-sembilan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 5.185.107,1 juta rupiah dengan sektor paling dominan yaitu pertambangan dan penggalian, Kabupaten Kerinci sebesar 5.121.484,1 juta rupiah dengan sektor paling dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, dan urutan terakhir yaitu Kota Sungai Penuh

sebesar 3.705.283,1 juta rupiah dimana sektor paling dominan yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2015 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi				Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	
Kerinci	6,45	6,7	6,03	5,10	6,07
Merangin	5,48	6,21	5,55	5,17	5,60
Sarolangun	3,09	4,26	4,69	4,72	4,19
Batanghari	4,36	4,55	4,82	4,96	4,67
Muaro Jambi	5,24	5,43	5,06	5,27	5,25
Tanjung Jabung Timur	1,87	2,70	3,13	3,13	2,71
Tanjung Jabung Barat	3,98	3,14	4,25	6,89	4,57
Bungo	5,28	5,38	5,6	5,02	5,32
Tebo	5,13	5,20	5,67	4,72	5,18
Kota Jambi	5,56	6,81	4,68	5,48	5,63
Kota Sungai Penuh	7,06	6,51	6,24	5,54	6,34

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2015 sampai 2018 memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi yang berbeda karena potensi daerah berbeda-beda. Potensi antara daerah yang berbeda disebabkan oleh sumber daya alam, terbatasnya sarana dan prasarana, perbedaan kesuburan tanah maupun perbedaan kondisi daerah secara geografis (Harefa, 2010). Diperlukan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Dari uraian di atas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui sector basis serta identifikasi struktur ekonomi pada sektor-sektor ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Sektor Basis dan Pola Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi ”** .

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor basis selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Provinsi Jambi merupakan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan sektor-sektor basis yang menunjang. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut.

Pengembangan potensi ekonomi sektor potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. Masih terdapat kesenjangan informasi di Provinsi Jambi tentang potensi- potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah, sehingga analisis sektor potensial perlu dilakukan untuk mengetahui potensi yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jambi di masa mendatang. Melalui pengembangan potensi ekonomi tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Misalnya, daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian, tetapi prioritas program pemerintahnya

mengarah pada sektor pariwisata, maka perkembangan sektor pertanian akan mengalami perlambatan bahkan sektor pertanian dapat memberi kontribusi yang rendah dibanding sektor pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam rangka pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang tepat dalam mendorong pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor ekonomi manakah yang menjadi sektor basis pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana gambaran pola pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sektor ekonomi yang menjadi sektor basis pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran pola pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dapat bermanfaat bagi instansi terkait dalam hal ini bagi pemerintahan daerah dan kantor wilayah. Memberikan informasi bagi para pengambil

kebijakan khususnya pemerintahan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam upaya pengembangan sektor basis menjadi meningkat dan mendorong sektor yang bukan basis untuk menjadi basis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka implementasi menuju tindakan praktisi untuk meningkatkan sektor-sektor ekonomi basis.